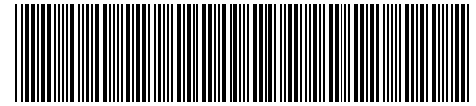




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.667789/2023**



DS:3264-8409-0110-0305

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |                     |  |
|-------------------------------|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)             | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (10)              | Badan Pembinaan Hukum Nasional   |
| 3. Provinsi                   | : (32)              | KEPULAUAN RIAU   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (667789)          | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU                                |
| Sebesar                       | : Rp. 1.059.938.000 | ( SATU MILIAR LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	1.059.938.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 1.059.938.000

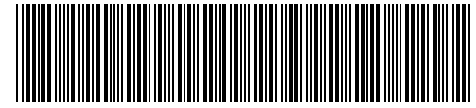
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023**



DS:3264-8409-0110-0305

Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

---

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	141.220.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	141.220.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	918.718.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	918.718.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



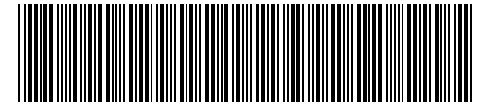
DS:3264-8409-0110-0305

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			141.220.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			141.220.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	35.722.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	35.722.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	105.498.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	105.498.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			918.718.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			918.718.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17,00	Kelompok Masyarakat	130.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	97.268.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	32.732.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3264-8409-0110-0305

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		7,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	115.010.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	7,00	Lembaga	115.010.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	95.018.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	layanan	81.622.000
		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	layanan	13.396.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		63,00	Orang	504.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	63,00	Orang	504.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		7,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	74.690.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	7,00	Kegiatan	74.690.000

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

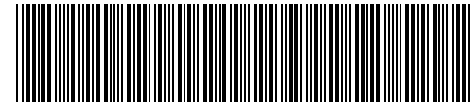
ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023**

**I B. SUMBER DANA**



DS:3264-8409-0110-0305

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
 Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	1.059.938.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.059.938.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3264-8409-0110-0305

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667789	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	-	1.050.938	9.000	-	-	1.059.938		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	141.220	-	-	-	141.220		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	141.220	-	-	-	141.220		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	35.722	-	-	-	35.722	32 . 52	
01	RM	-	35.722	-	-	-	35.722	009	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	105.498	-	-	-	105.498	32 . 52	
01	RM	-	105.498	-	-	-	105.498	009	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	909.718	9.000	-	-	918.718		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	909.718	9.000	-	-	918.718		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	130.000	-	-	-	130.000	32 . 52	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3264-8409-0110-0305

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	130.000	-	-	-	130.000	009	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	115.010	-	-	-	115.010	32 . 52	
01 RM		-	115.010	-	-	-	115.010	009	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	86.018	9.000	-	-	95.018	32 . 52	
01 RM		-	86.018	9.000	-	-	95.018	009	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	504.000	-	-	-	504.000	32 . 52	
01 RM		-	504.000	-	-	-	504.000	009	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	74.690	-	-	-	74.690	32 . 52	
01 RM		-	74.690	-	-	-	74.690	009	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.050.938</b>	<b>9.000</b>	-	-	<b>1.059.938</b>		

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3264-8409-0110-0305

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

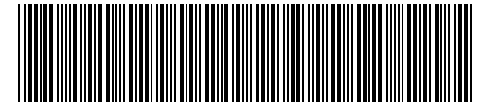
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667789	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	17.930	33.570	120.672	32.998	107.273	218.388	91.840	99.744	179.376	88.896	63.955	5.296	1.059.938
		<b>BELANJA BARANG</b>	17.258	27.221	120.672	32.998	105.923	218.388	91.840	99.442	179.376	88.896	63.955	4.970	1.050.938
		<b>BELANJA MODAL</b>	672	6.349	0	0	1.350	0	0	302	0	0	0	327	9.000
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4.326	6.930	18.464	3.050	27.028	7.776	9.810	20.643	31.912	7.526	2.555	1.200	141.220
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.326	6.930	18.464	3.050	27.028	7.776	9.810	20.643	31.912	7.526	2.555	1.200	141.220
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	13.604	26.640	102.208	29.948	80.245	210.612	82.030	79.101	147.464	81.370	61.400	4.096	918.718
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.932	20.291	102.208	29.948	78.895	210.612	82.030	78.799	147.464	81.370	61.400	3.770	909.718
		53 BELANJA MODAL	672	6.349	0	0	1.350	0	0	302	0	0	0	327	9.000

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023  
IV A. B L O K I R**



DS:3264-8409-0110-0305

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU  
Kode dan Nama Satker : [667789] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

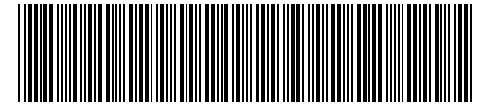
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2023  
IV B. C A T A T A N**



DS:3264-8409-0110-0305

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU  
Kode dan Nama Satker : [667789] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001